



Article Informations
Corresponding Email:
shafiraden4@gmail.com

Received: 04/02/2025; Accepted:
16/02/2025; Published: 30/06/2025

KEPENTINGAN INDONESIA DALAM MEMBERIKAN HIBAH LUAR NEGERI KEPADA NEGARA-NEGARA DI KAWASAN PASIFIK SELATAN TAHUN 2019-2023

Raden Shafira Nashafati Hamijaya¹⁾, Suwarti Sari²⁾, Renaldo Benarrivo³⁾

^{1,2,3)}Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kepentingan Indonesia dalam memberikan hibah luar negeri kepada negara-negara di kawasan Pasifik Selatan selama periode 2019- 2023. Pemberian hibah ini merupakan wujud tanggung jawab moral sebagai negara berkembang yang menjunjung tinggi solidaritas global serta menjadi instrumen strategis untuk memperkuat hubungan internasional. Hibah digunakan untuk mempromosikan perdamaian, meningkatkan kerja sama bilateral, serta memperkuat pengaruh Indonesia di kawasan tersebut. Penelitian ini menganalisis hibah sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk mencapai kepentingan nasional yang mencakup aspek pertahanan, ekonomi, tata kelola internasional, dan ideologi. Dalam konteks pertahanan, hibah digunakan untuk menjaga stabilitas regional yang penting bagi keamanan nasional. Dari segi ekonomi, hibah diarahkan untuk memperkuat hubungan perdagangan dan investasi. Pada aspek tata kelola internasional, hibah menjadi sarana untuk mempromosikan nilai-nilai universal seperti demokrasi dan penghormatan terhadap hukum internasional. Sementara itu, dalam dimensi ideologi, hibah mencerminkan komitmen Indonesia terhadap inklusivitas dan keterbukaan dalam hubungan internasional. Studi ini menyimpulkan bahwa hibah luar negeri merupakan kebijakan strategis yang dirancang untuk memperkuat posisi Indonesia di kawasan Pasifik Selatan, dengan tetap memprioritaskan kepentingan nasional.

Kata Kunci: Hibah luar negeri, Pasifik Selatan, Kepentingan Nasional, Kerja sama

Abstract

This study examines Indonesia's foreign aid strategy to South Pacific countries from 2019 to 2023, focusing on the underlying motivations and the alignment with Indonesia's national interests. The provision of foreign aid by Indonesia is evaluated not only as a humanitarian gesture but also as a strategic tool that promotes national security, economic benefits, regional stability, and adherence to international norms. The study highlights how these aid efforts reflect Indonesia's commitment to maintaining peace and fostering cooperation in the South Pacific region, while

simultaneously advancing its own geopolitical and economic priorities. It also discusses the role of foreign aid in strengthening Indonesia's influence in the Pacific, aligning with its broader goals of regional stability and integration within the international community. Through this analysis, the paper concludes that Indonesia's foreign aid policies serve as a rational extension of its national interests, blending soft power with strategic objectives to secure a more stable and prosperous regional environment.

Keywords: *Foreign aid, National interests, South Pacific, cooperation*

PENDAHULUAN

Kerja sama fungsional melibatkan interaksi positif antar negara-negara untuk mencapai kepentingan bersama. Sementara itu, kerja sama konflik-konflik melibatkan upaya untuk mengurangi atau mengatasi ketegangan daripada konflik. Pada akhirnya, pembangunan pemahaman bersama dilakukan untuk mendukung komunikasi dan saling pengertian di antara pihak yang bekerja sama. Adapun Kerja sama Internasional dibagi berdasarkan jumlah aktor yang berpartisipasi dalam kerja sama tersebut, yakni bilateral, regional dan multilateral. Kerja sama bilateral merupakan elemen penting dalam hubungan internasional, di mana dua negara bekerja sama dalam berbagai aspek seperti perdagangan, keamanan, dan pembangunan.¹ Kesepakatan dagang antara dua negara adalah contoh nyata dari kerja sama ini, yang bertujuan untuk meningkatkan akses pasar dan memperkuat hubungan ekonomi. Selain itu, dalam bidang keamanan, kerja sama bilateral dapat melibatkan pertukaran informasi intelijen atau kerjasama militer untuk mengatasi ancaman bersama.

Bantuan pembangunan juga sering kali menjadi bagian penting dari kerja sama bilateral, di mana negara yang lebih maju memberikan dukungan finansial atau teknis kepada negara mitra untuk meningkatkan infrastruktur dan pembangunan manusianya, contohnya adalah kerja sama Indonesia dan Korea Selatan dalam pengembangan industri kapal selam untuk Indonesia.² Pada tahun 2011, Indonesia memperkenalkan program Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) yang dirancang untuk mendukung pembangunan negara-negara mitra Kerja sama Selatan-Selatan (KSS).³ Program ini mencakup berbagai inisiatif strategis yang bertujuan untuk memperkuat fondasi pembangunan di negara-negara penerima. Inisiatif tersebut meliputi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, serta pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Dengan demikian, program ODA tidak hanya berfokus pada satu aspek tertentu tetapi mencakup pendekatan holistik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di negara-negara mitra.

Salah satu contoh nyata dari implementasi program ini adalah pemberian hibah oleh Indonesia kepada negara-negara mitra KSS untuk

¹ Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, *Power and Interdependence: World Politics in Transition* (Boston: Little, Brown and Company, 1977)

² Clara Lucia Marghanita, "Kerjasama Indonesia-Korea Selatan dalam Pengembangan Industri Kapal Selam", *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, Vol. 9, No. 3 (2023).

³ Fikry Cassidy, et.al., Directed by Siswo Pranomo, *Kerja Sama Selatan-Selatan sebagai Instrumen Kebijakan Luar Negeri Indonesia*, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, (Jakarta, 2016).

mendukung berbagai proyek pembangunan di negara-negara kawasan Pasifik Selatan antara lain Fiji, Kiribati, Kepulauan Marshall, Kepulauan Cook, Nauru, Palau, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu dan Vanuatu.⁴ Hibah ini mencerminkan dedikasi Indonesia dalam memperkuat kerja sama dan solidaritas antarnegara berkembang. Melalui bantuan ini, Indonesia berusaha untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan dengan negara-negara mitra. Inisiatif seperti ini juga menunjukkan komitmen Indonesia dalam memainkan peran aktif di kancah internasional, khususnya dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan di negara-negara berkembang. Melalui program ODA atau Indonesia AID, Indonesia tidak hanya membantu negara lain tetapi juga membangun citra sebagai negara yang proaktif dan peduli terhadap isu-isu global. South-south cooperation menjadi semakin penting dalam agenda pembangunan global karena memungkinkan negara-negara berkembang di kawasan untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan luar dan membangun kemandirian dalam memecahkan masalah lokal. Selain itu, kerja sama ini mempromosikan penciptaan lapangan kerja, pemerataan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat di seluruh dunia.

Hibah yang diberikan oleh Indonesia seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara Pasifik. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu negara-negara mitra dalam membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mengembangkan kapasitas kelembagaan. Tetapi Efektivitas dari pemberian hibah dalam mencapai tujuan yang diharapkan juga perlu dievaluasi.⁴ Apakah hibah tersebut benar-benar membawa perubahan positif dalam aspek-aspek yang ditargetkan, ataukah ada kesenjangan antara tujuan dan hasil yang dicapai? Akhirnya memunculkan pertanyaan apakah hibah tersebut berhasil meningkatkan kualitas pembangunan di negara-negara penerima? Apa kepentingan Indonesia dalam memberikan hibah tersebut?

Hal ini menjadi menarik, karena di sebutkan sebelumnya bahwa Indonesia memiliki peran besar di dalam South-south cooperation itu sendiri. Bahkan Indonesia adalah tuan rumah bagi negara-negara Asia- Afrika kala itu pada tahun 1955 atau yang biasa disebut dengan Konferensi Asia-Afrika.⁵ Tidak hanya KAA yang menjadi peran Indonesia untuk menjadi promotor dari terbentuknya kerja sama South-south cooperation ini, Indonesia juga selalu berperan aktif dalam memberikan bantuan kepada negara-negara dalam Southsouth cooperation. Bantuan yang diberikan biasanya berupa hibah dan berbagai bentuk pelatihan dalam bidang pertanian, perikanan, good governance, serta UKM. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Indonesia telah memberikan hibah lebih dari 700 program kepada South-south cooperation dengan nilai di atas 60 juta Dolar Amerika, bahkan pada tahun 2016 saja,

⁴ Baylis, J., Smith, S., & Owens, P, *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. (Oxford University Press, 2017)

⁵ Kegley, C. W., & Blanton, S. L, *World Politics: Trend and Transformation*, (Boston: Cengage Learning ,2020). 39-42.

Indonesia telah memberikan hibah dengan nilai 15,08 juta Dolar Amerika.⁶ Program South-south cooperation di Indonesia telah di implementasikan secara berkala sejak tahun 1980-an. Tetapi baru dimulai pada tahun 2010, KSS menjadi bagian dari kebijakan luar negeri Indonesia dan tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010-2014 dan program ini terus berlanjut hingga tahun 2020-2024. Pada tahun 2019 dibentuklah Lembaga Dana Kerja sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau disebut juga sebagai Indonesia Agency for International Development (Indonesia AID). Badan ini dibentuk sebagai usaha Indonesia agar Indonesia dapat berperan lebih aktif dalam kerja sama tersebut.

Untuk membantu peneliti dalam melakukan analisisnya, maka kerangka teori dibutuhkan sebagai landasan berpikir. Dalam penelitian yang membahas mengenai kepentingan Indonesia terhadap negara-negara di kawasan Pasifik Selatan melalui pemberian hibah maka diambil beberapa teori sebagai berikut.

Joseph Nye dalam pemikirannya tentang neo-liberalisme mengungkapkan bahwa interdependensi ekonomi antara negara-negara telah membentuk sebuah sistem global di mana ketergantungan antarnegara menjadi semakin tak terelakkan dalam bidang ekonomi, keamanan, dan politik.⁷ Dalam pandangan neo-liberalism, fenomena ini tidak hanya mengekspresikan sebuah realitas, tetapi juga membawa implikasi yang mendalam terhadap dinamika hubungan internasional. Dengan semakin meluasnya interdependensi, kerja sama internasional menjadi semakin penting, sementara institusi global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Kerja Sama Selatan-Selatan (SSC) menjadi sarana utama untuk memfasilitasi interaksi antarnegara.⁸ Pentingnya kerja sama internasional dalam kerangka neo-liberalism terutama tampak dalam upaya mengatasi tantangan global bersama seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan konflik bersenjata. Institusi-institusi internasional tersebut berfungsi sebagai forum untuk negosiasi dan implementasi kebijakan yang dirancang untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut secara bersama-sama.

Namun, dalam praktiknya, upaya kerja sama ini sering kali dihadapi oleh berbagai hambatan, termasuk tidak efektif-an dalam pengambilan keputusan, ketegangan politik antarnegara, dan kepentingan nasional yang bertentangan. Teori kerja sama internasional yang dikembangkan oleh Scott Barrett mengasumsikan bahwa pengaturan kerja sama antar negara harus rasional secara individual dan kolektif: rasional secara individual karena pilihan untuk menjadi pihak dalam suatu perjanjian bersifat sukarela; rasional secara kolektif karena para diplomat saling bertatap muka sehingga dapat memanfaatkan sepenuhnya potensi keuntungan bersama dari kerja

⁶ A. Pujayanti, "Kerja Sama Selatan-Selatan dan Manfaatnya Bagi Indonesia (South-South Cooperation and Its Benefit for Indonesia)", *Journal Politica*, Vol. 6, No.1 (2015). 63-86. Lihat juga Tim Koordinasi Nasional KSST Indonesia, "Laporan Tahunan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) Indonesia 2016", Laporan, (2016), internet: <https://isstc.setneg.go.id/index.php>, diakses pada 21 April 2024.

⁷ Joseph Nye, *The Paradox of American Power: Why the World's Only Superpower Can't Go It Alone* (Oxford: Oxford University Press, 2002).

⁸ Ibid.

sama dalam suatu perjanjian.⁹ Rasionalitas individu merupakan asumsi standar dalam literatur. Rasionalitas kolektif adalah asumsi yang lebih baru, namun tetap menarik. Dalam makalah ini saya menunjukkan bahwa kombinasi asumsi-asumsi ini mempunyai implikasi besar terhadap teori kerja sama internasional.

Gagasan utama yang mendasari teori kerja sama internasional yang diuraikan dalam konteks ini adalah bahwa Indonesia yang membentuk kerja sama Selatan-Selatan haruslah rasional secara individual dan kolektif.¹⁰ Rasionalitas secara individual menjadi prasyarat penting karena dalam sistem internasional yang bersifat anarkis, setiap negara memiliki kebebasan untuk membuat keputusan yang paling menguntungkan bagi dirinya sendiri. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa keputusan tersebut juga menguntungkan secara kolektif, karena negara-negara bekerja sama secara eksplisit dan memiliki kemampuan untuk mengubah kembali perjanjian mereka kapan pun diperlukan.

Hill mengungkapkan bahwa kebijakan luar negeri merupakan segala aktivitas eksternal resmi yang dilakukan oleh aktor independen (biasanya negara, tetapi tidak eksklusif bagi negara saja).¹¹ Berdasarkan dua definisi yang dikemukakan oleh Hill dan Hudson di atas, ada tiga hal yang perlu ditekankan. Pertama, sebuah kebijakan memiliki akar pada konsep pilihan sehingga negara harus menentukan tindakan atau membuat keputusan-keputusan untuk mencapai suatu tujuan. Kedua, kebijakan yang ditujukan ke luar wilayah negara atau ditargetkan untuk entitas eksternal menunjukkan adanya kontrol atau batasan terhadap kedaulatan yang dimiliki suatu negara. Ketiga, konsep yang melekat pada kebijakan luar negeri tidak akan pernah terlepas dari kepentingan nasional sebuah negara.¹²

Rosenau mengembangkan suatu teori kebijakan luar negeri dengan memusatkan perhatiannya pada analisis perspektif adaptif yang menggambarkan pembuatan kebijakan luar negeri yang diambil oleh para pembuat keputusan sebagai sebuah respons terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal. Pada hakikatnya, menurut Rosenau, kebijakan luar negeri yang diambil oleh negara merupakan tindakan adaptif untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya dengan tujuan untuk mempertahankan kepentingan nasional. Setiap perilaku kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah dianggap adaptif ketika mengatasi atau mendorong perubahan dalam lingkungan eksternal yang bertujuan untuk mempertahankan struktur esensial negara.¹³ Dalam hal ini, struktur esensial yang dimaksud meliputi pemerintahan, ekonomi, struktur sosial, dan physical base yang membentuk pola keterkaitan satu dengan yang lain.

⁹ Scott Barrett, "A Theory of International Cooperation" *Journal of Theoretical Politics*, Volume 11, No. 4, (1999) 519-541.

¹⁰ Keohane, R.O, *After Hegemony*, (Princeton: Princeton University, 1984)

¹¹ Hill, Christopher, 2016. *Foreign Policy in the Twenty First Century* Second Edition. London: Palgrave Macmillan.

¹² Perwita, Anak Agung Banyu, dan Yanyan Yani, 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

¹³ Rosenau, James N., 1974. *Comparing Foreign Policy: Theories, Findings, and Methods*. New York: Sage Publication.

Konsep kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Benjamin Frankel dalam bukunya *International Relations in a Changing World* mengemukakan bahwa kepentingan nasional merupakan kunci utama dalam konsep kebijakan luar negeri yang menjadi pokok dari total keseluruhan nilai-nilai nasionalisme suatu bangsa.¹⁴ Benjamin Frankel menjelaskan bahwa kepentingan nasional sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kebijakan luar negeri Indonesia yang memberi hibah untuk mendukung kerja sama Selatan-Selatan (*South-south cooperation*) merupakan contoh konkret dari upaya negara dalam mewujudkan kepentingan nasional melalui kerja sama internasional. Indonesia memahami bahwa keberhasilan dalam diplomasi dan kerja sama internasional dapat membantu mencapai tujuan-tujuan strategis nasional, seperti peningkatan pengaruh regional dan global, serta pemajuan kesejahteraan rakyat.

Dalam konteks ini, hibah yang diberikan oleh Indonesia untuk mendukung inisiatif kerja sama Selatan-Selatan esensial mereka Selatan menjadi instrumen yang penting untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara berkembang lainnya dan mempromosikan solidaritas di antara mereka. Kepentingan nasional, yang merupakan tujuan fundamental dan faktor penentu akhir dalam merumuskan kebijakan luar negeri suatu negara, memainkan peran krusial dalam setiap langkah diplomasi Indonesia. Dalam kasus pemberian hibah untuk kerja sama Selatan-Selatan, Indonesia mengakui bahwa membantu negara-negara berkembang lainnya untuk mencapai kemajuan ekonomi dan sosial adalah dalam kepentingan nasional jangka panjang. Dengan demikian, kebijakan luar negeri Indonesia mengintegrasikan aspek kepentingan nasional dengan visi global yang inklusif, yang menempatkan pembangunan dan kesejahteraan bersama sebagai prioritas utama.

Dalam proses mendapatkan kepentingan tersebut, negara memilih bahwasanya kepentingan atau tujuan negara yang berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup bagi sebuah negara dan merupakan identitas bagi kebijakan luar negeri sebuah negara maka negara tersebut menempatkan kepentingan nasional itu sebagai yang primer atau vital. Sedangkan di bagi menjadi empat kepentingan yang dapat di lihat sebagai landasan suatu negara mengeluarkan kebijakan luar negerinya.¹⁵ Untuk membantu peneliti melakukan penelitiannya maka metode penelitian sangat lah penting sebagai cara untuk mencari data ataupun penelitian. Metode penelitian kualitatif ini dipilih karena aspek-aspek yang berkaitan mulai dari tujuan utama untuk menafsirkan sebuah perilaku negara yang sulit untuk dipahami, pemosisian peneliti sebagai instrumen utama penelitian, hingga fleksibilitas dari penelitian akan membantu peneliti untuk menyesuaikan dengan fenomena dan data-data baru yang ditemukan selama proses penelitian berjalan.¹⁶

¹⁴ Benjamin Frankel, *In the National Interest* (Maryland: University Press of America, 1989). 93

¹⁵ Donald E. Nuchterlain, *United States National Interests in a Changing World* (Kentucky: University Press of Kentucky, 1973) 113.

¹⁶ Umar, Suryadi Bakry. 2016. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, cetakan ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). Hal: 18-20.

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tipe eksplanatif dengan tujuan utama untuk mengetahui dan menjelaskan apa kepentingan Indonesia dalam pemberian hibah terhadap Kerja Sama Selatan-Selatan. Dengan tipe deskriptif maka penelitian ini akan melihat fakta-fakta yang ditemukan sebagai sesuatu yang spesifik dan kontekstual yang bergantung pada pemaknaan aktor yang terlibat dalam situasi sosial.¹⁷ Dengan demikian penelitian deskriptif ini akan menghasilkan informasi-informasi yang tepat mengenai keadaan yang terjadi saat ini, tipe penelitian ini juga sesuai untuk menggambarkan, menjelaskan, memahami, serta menganalisis, bagaimana pemberian hibah Indonesia terhadap Kerja Sama Selatan-Selatan menjadi sebuah kepentingan nasional Indonesia itu sendiri. Sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan dalam melakukan penelitian ini, maka data yang dikumpulkan oleh peneliti adalah dengan menggunakan dua sumber yaitu data primer dan data sekunder.

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan data primer dengan teknik wawancara dan data sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan. Studi pustaka merupakan teknik yang diaplikasikan dengan cara mengumpulkan data dan fakta yang bersumber dari buku, dokumen, majalah, arsip, maupun jurnal yang terdapat secara offline maupun online sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik ini merupakan suatu cara untuk melakukan pengumpulan data sekunder menggunakan berbagai sumber yang ada, serta peneliti akan memperoleh ide-ide baru dari data yang diperoleh tersebut.

PEMBAHASAN

Kepentingan Pertahanan

Kepentingan pertahanan Indonesia dalam memberikan hibah kepada negara-negara di Pasifik Selatan tidak lepas dari isu Papua Barat, yang menjadi salah satu topik sensitif dalam hubungan luar negeri Indonesia. Isu ini menyangkut kedaulatan dan integritas teritorial Indonesia, mengingat adanya gerakan separatis dan tuntutan penentuan nasib sendiri yang sering kali mendapat perhatian dari beberapa negara di Pasifik Selatan, seperti Vanuatu dan Fiji, yang cenderung bersimpati terhadap aspirasi kemerdekaan Papua Barat. Oleh karena itu, pemberian hibah dan bantuan kepada negara-negara di kawasan ini bukan hanya bentuk diplomasi bantuan, tetapi juga bagian dari strategi pertahanan Indonesia. Melalui bantuan tersebut, Indonesia berupaya mengurangi dukungan internasional terhadap gerakan separatis, membangun hubungan diplomatik yang lebih erat, serta memperkuat aliansi politik di kawasan Pasifik.

Hibah ini memungkinkan Indonesia untuk mengelola persepsi internasional dengan menunjukkan komitmen terhadap pembangunan dan kesejahteraan di Papua Barat, sekaligus mencegah intervensi asing yang dapat mengancam stabilitas nasional. Selain itu, bantuan ini juga berfungsi untuk mendukung keamanan maritim, mengingat wilayah Papua Barat memiliki jalur pelayaran strategis dan sumber daya alam yang melimpah. Dengan menjalin kerjasama pertahanan dan keamanan dengan negara-

¹⁷ William, Newman. 2000. *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*. (Boston: Allyn And Bacon) Hal: 72.

negara Pasifik Selatan melalui program hibah, Indonesia dapat memperkuat posisinya di kawasan, menjaga stabilitas maritim, serta mengamankan kepentingan strategis dalam pengelolaan sumber daya alam. Secara keseluruhan, kepentingan pertahanan Indonesia dalam konteks ini adalah untuk memastikan kedaulatan teritorial tetap terjaga, mengurangi potensi ancaman separatistis, dan memperkuat posisi strategisnya di kawasan Asia-Pasifik yang semakin dinamis.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan Indonesia untuk mengendalikan narasi ini adalah dengan memberikan hibah kepada negara-negara kawasan Pasifik Selatan. Hibah ini bertujuan untuk mempererat hubungan diplomatik dan meningkatkan pengaruh Indonesia di kawasan tersebut. Melalui hibah, Indonesia dapat memberikan bantuan dalam bentuk proyek pembangunan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, atau penyediaan bantuan kemanusiaan yang dapat meningkatkan citra positif Indonesia di mata negara-negara Pasifik. Dalam konteks ini, hibah tidak hanya berfungsi sebagai alat diplomasi ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengurangi ketegangan yang timbul akibat isu Papua Barat. Dengan membantu negara-negara tersebut dalam pembangunan dan kemajuan sosial-ekonomi mereka, Indonesia dapat mengalihkan perhatian dari isu Papua Barat dan memperkuat aliansi strategis dengan negara-negara di kawasan tersebut.

Selain itu, hibah juga dapat memperbaiki hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan yang memiliki pengaruh politik di forum internasional. Dukungan Indonesia dalam bentuk hibah dapat meminimalisir dukungan mereka terhadap tuntutan kemerdekaan Papua Barat dan membantu membangun narasi yang lebih sejalan dengan kebijakan Indonesia mengenai Papua. Dengan begitu, hibah dapat menjadi bagian dari strategi untuk menjaga stabilitas politik dan sosial di kawasan, yang pada gilirannya mendukung kepentingan pertahanan Indonesia.

Jadi dapat diketahui adanya pemberian hibah yang cukup masif dilakukan oleh Indonesia ke negara-negara di Kawasan Pasifik Selatan karena adanya kepentingan Indonesia dalam bentuk pertahanan, yaitu menjaga kedaulatan wilayah Indonesia khususnya isu yang berada di daerah Papua. Bentuk hibah juga adalah bentuk diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia sebagai upaya meredam isu Papua semakin meluas. Dengan demikian, mengendalikan narasi negara-negara di kawasan Pasifik Selatan mengenai isu Papua Barat tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari diplomasi publik, tetapi juga sebagai instrumen pertahanan untuk menjaga keutuhan wilayah dan stabilitas nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian narasi merupakan aspek penting dalam strategi pertahanan Indonesia, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap persepsi internasional, legitimasi politik, dan stabilitas di wilayah perbatasan timur Indonesia.

Kepentingan Ekonomi

Kepentingan Ekonomi Indonesia dalam memberikan hibah kepada negara-negara di Pasifik Selatan tentu saja ada kaitannya dengan investasi agar dapat membuka pasar yang lebih luas atau kesempatan ekonomi yang Indonesia lakukan di negara-negara tersebut. Pada 2019 tepatnya, Indonesia menanda-tangani perjanjian kerja sama

ekonomi antara Indonesia dengan negara-negara di Kawasan Pasifik Selatan.¹⁸ Didalam kontrak kerja sama tersebut terdapat perjanjian sebesar 12.3 Juta Dolar Australia untuk salah satu firma konstruksi Indonesia dalam membangun infrastruktur di Fiji, Papua Nugini, dan Kiribati. Setelah penandatanganan perjanjian tersebut, Indonesia semakin gencar untuk mendekati Pasifik Selatan dalam perdagangan Indonesia sendiri. Karena adanya Covid-19 pada tahun 2020 yang membuat beberapa aktifitas ekspor dan perdagangan Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan berhenti sementara waktu. Tetapi bantuan Kesehatan demi kepulihan negara-negara yang menjadi pasar Indonesia ini terus dikeluarkan, sehingga ada harapan dari Indonesia perdagangan dengan negara tersebut bisa cepat dilanjutkan karena kepulihan ekonomi pun terjadi.

Betul saja, salah satu negara-nya yaitu Fiji, di mana pada tahun 2019 total ekspor Indonesia ke negara tersebut mencapai 26.2 Juta Dolar Amerika, selanjutnya pada tahun 2020 menurun menjadi 20,9 Juta Dolar Amerika, lalu pada 2023 angka ini melesat jauh naik dengan lebih dari 60% hanya dalam kurun waktu 2 tahun, total ekspor Indonesia ke negara tersebut mencapai 43,8 Juta Dolar Amerika.¹⁹ Jadi dapat dikatakan bahwa pemberian hibah Indonesia kepada negara-negara di Pasifik Selatan dilakukan demi kepentingan ekonomi Indonesia yaitu menjadi investor di negara-negara tersebut dan berkesempatan melebarkan atau menciptakan pasar yang dapat di tarik menjadi pendapatan Indonesia itu sendiri. Maka pada sub-sub bab selanjutnya peneliti akan memaparkan Bagaimana Indonesia berhasil menghasilkan pasar yang menjadi pendapatan negara melalui perdagangan.

Kepentingan Tata Internasional

Indonesia juga berperan dalam mendorong tata kelola global yang adil dengan memberikan perhatian khusus pada negara-negara kecil di Pasifik Selatan melalui bantuan pembangunan, hibah, dan program kerjasama teknis. Bantuan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas negara-negara di kawasan ini dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, pembangunan infrastruktur, dan ketahanan ekonomi. Hibah yang diberikan oleh Indonesia, misalnya, digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit, serta untuk mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis di bidang energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan manajemen bencana.

Melalui langkah ini, Indonesia tidak hanya memperkuat posisi strategisnya sebagai mitra terpercaya di kawasan Pasifik Selatan, tetapi juga memperluas pengaruhnya dalam struktur tata kelola internasional. Upaya ini sejalan dengan prioritas Indonesia untuk menciptakan lingkungan regional yang stabil dan mandiri, yang dapat mendukung tatanan ekonomi global yang lebih adil dan seimbang. Bantuan ini juga mencerminkan strategi soft power Indonesia yang berupaya mengurangi ketergantungan negara-

¹⁸ Antara, "Indonesia signs economic agreement with South Pacific countries" Ed: Rahmad Nasution, Antara Indonesian News Agency, 21 Maret 2019, Internet, <https://en.antaranews.com/news/122856/indonesia-signs-economic-agreement-with-south-pacific-countries>.

¹⁹ Trading Economics, "Indonesia Exports to Fiji", Report Trading Economics, diakses pada 8 November 2024, di: <https://tradingeconomics.com/indonesia/exports/fiji>.

negara kecil pada kekuatan besar, serta mempromosikan hubungan yang lebih egaliter di antara negara-negara di kawasan.

Sebagai contoh, dalam menghadapi dampak perubahan iklim, Indonesia membantu negara-negara kepulauan kecil di Pasifik Selatan mengakses teknologi adaptasi iklim, seperti sistem peringatan dini untuk bencana alam dan program rehabilitasi ekosistem pesisir. Program-program ini meningkatkan ketahanan lokal sekaligus memberikan nilai tambah bagi kepemimpinan Indonesia dalam isu-isu global. Selain itu, pendekatan ini memperkuat reputasi Indonesia sebagai negara yang mampu menjembatani kebutuhan lokal negara-negara kecil dengan agenda global yang lebih luas, seperti yang tercermin dalam Sustainable Development Goals (SDGs).²⁰

Kepentingan Ideologi

Dalam konteks kawasan Pasifik Selatan, Indonesia berupaya melindungi dan mempromosikan nilai-nilai ideologis yang menjadi pedoman utama dalam hubungan internasional, seperti keterbukaan, inklusivitas, kerja sama, dan ketaatan terhadap hukum internasional.²¹ Prinsip-prinsip ini sejalan dengan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), yang menekankan pentingnya pendekatan inklusif dalam menghadapi tantangan kawasan. Di Pasifik Selatan, nilai-nilai tersebut menjadi semakin relevan mengingat tekanan geopolitik dari kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, serta dampak perubahan iklim yang signifikan terhadap negara-negara pulau kecil di kawasan tersebut. Dari bahwa kawasan Pasifik Selatan memegang peran strategis dalam tatanan global. Oleh karena itu, langkah-langkah diplomasi yang mendukung penguatan nilai-nilai ideologis dilakukan melalui mekanisme dialog multilateral dan penguatan kerja sama bilateral. Misalnya, melalui Pacific Island Forum (PIF), Indonesia mendorong pengintegrasian isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan sebagai prioritas bersama, yang juga mencerminkan prinsip inklusivitas dan kolaborasi. Selain itu, Indonesia menjadi tuan rumah berbagai dialog regional yang berfokus pada tata kelola laut, perlindungan lingkungan, dan perdamaian kawasan.

Ancaman terhadap nilai-nilai dapat datang dalam berbagai bentuk, seperti tindakan unilateral yang mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan keberlanjutan, meningkatnya aktivitas terorisme, atau tekanan politik dari negara-negara besar yang dapat memicu ketidakstabilan kawasan. Sebagai respons, Indonesia tidak hanya memperkuat mekanisme kerja sama regional, tetapi juga mendorong penerapan norma-norma hukum internasional yang adil untuk memastikan keberlanjutan tatanan internasional berbasis aturan. Dengan pendekatan ini, Indonesia memperjuangkan stabilitas ideologis di kawasan Pasifik Selatan tetapi juga mengukuhkan posisinya sebagai negara yang aktif dalam menjaga keseimbangan kekuatan global. Upaya ini juga merupakan bagian dari strategi Indonesia untuk memperluas pengaruh diplomatiknya sambil

²⁰ United Nations Development Programme. (2023). Climate Resilience in the Pacific: Indonesia's Role in Regional Stability.

²¹ RR Zahroh Hayati Azizah, dkk., "The National Interests of Indonesia and Japan in the Indo-Pacific Region and the Defense Cooperation of the Two Countries", *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 10, No. 2., (2023) Hal.119- 132.

melindungi kepentingan nasionalnya di tengah dinamika internasional yang semakin kompleks.

KESIMPULAN

Pemberian hibah luar negeri oleh Indonesia kepada negara-negara di kawasan Pasifik Selatan mencerminkan strategi diplomasi yang berakar pada kepentingan nasional yang melibatkan berbagai aspek. Indonesia memandang hibah luar negeri sebagai salah satu cara untuk mempromosikan perdamaian di kawasan. Langkah ini dilakukan dengan memperkuat stabilitas hubungan bilateral dan multilateral, memastikan kawasan Pasifik Selatan bebas dari konflik, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Pemberian hibah juga selaras dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang aktif dan bebas, serta berkontribusi pada upaya menciptakan perdamaian regional yang menjadi prasyarat stabilitas internasional.

Hibah tersebut mencerminkan pendekatan rasional baik secara individual maupun kolektif. Secara individual, Indonesia memastikan pengaruhnya tetap terjaga dalam menjalin hubungan diplomatik yang saling menguntungkan. Secara kolektif, hibah menjadi instrumen untuk menunjukkan solidaritas kepada negara-negara kecil di Pasifik Selatan yang memiliki tantangan ekonomi dan sosial, memperkuat kerja sama regional, serta memperjuangkan kepentingan bersama dalam berbagai forum internasional.

Kebijakan hibah juga berakar pada kepentingan nasional yang mencakup empat pilar utama; (1) Dalam pertahanan menjaga stabilitas kawasan untuk menghindari eskalasi isu sensitif seperti Papua Barat, sekaligus mencegah pengaruh eksternal yang berpotensi mengganggu kedaulatan dan integritas wilayah. (2) secara ekonomi Hibah membuka jalan bagi kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi di kawasan Pasifik Selatan, menciptakan peluang pasar baru bagi Indonesia. (3) Tata Kelola Internasional Melalui hibah, Indonesia menegaskan komitmennya terhadap nilai-nilai tata kelola global seperti inklusivitas, kerja sama, dan penghormatan terhadap hukum internasional. (4) Ideologi: Hibah mencerminkan nilai-nilai nasional seperti solidaritas dan kemanusiaan yang menjadi landasan diplomasi Indonesia di kawasan. Dengan pendekatan yang terintegrasi ini, hibah luar negeri tidak hanya menjadi instrumen diplomasi, tetapi juga alat untuk mengamankan posisi strategis Indonesia di Pasifik Selatan, baik dari aspek politik, ekonomi, maupun sosial budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Pujayanti, "Kerja Sama Selatan-Selatan dan Manfaatnya Bagi Indonesia (South-South Cooperation and Its Benefit for Indonesia)", *Journal Politica*, Vol. 6, No.1 (2015). 63-86. Lihat juga Tim Koordinasi Nasional KSST Indonesia, "Laporan Tahunan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) Indonesia 2016", Laporan, (2016), internet: <https://isstc.setneg.go.id/index.php>, diakses pada 21 April 2024. Antara, "Indonesia signs economic agreement with South Pacific countries" Ed: Rahmad Nasution, Antara Indonesian News Agency, 21 Maret 2019,

- Internet, <https://en.antaranews.com/news/122856/indonesia-signs-economic-agreement-with-south-pacific-countries>.
- Baylis, J., Smith, S., & Owens, P, *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. (Oxford University Press, 2017)
- Benjamin Frankel, *In the National Interest* (Maryland: University Press of America, 1989). 93
- Clara Lucia Marghanita, “Kerjasama Indonesia-Korea Selatan dalam Pengembangan Industri Kapal Selam”, *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, Vol. 9, No. 3 (2023).
- Donald E. Nuchterlain, *United States National Interests in a Changing World* (Kentucky: University Press of Kentucky, 1973) 113.
- Fikry Cassidy, et.al., Directed by Siswo Pranomo, *Kerja Sama Selatan-Selatan sebagai Instrumen Kebijakan Luar Negeri Indonesia*, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, (Jakarta, 2016).
- Hill, Christopher, 2016. *Foreign Policy in the Twenty First Century Second Edition*. London: Palgrave Macmillan.
- Joseph Nye, *The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower Can’t Go It Alone* (Oxford: Oxford University Press, 2002).
- Kegley, C. W., & Blanton, S. L, *World Politics: Trend and Transformation*, (Boston: Cengage Learning ,2020). 39-42.
- Keohane, R.O, *After Hegemony*, (Princeton: Princeton University, 1984)
- Perwita, Anak Agung Banyu, dan Yanyan Yani, 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, *Power and Interdependence: World Politics in Transition* (Boston: Little, Brown and Company, 1977)
- Rosenau, James N., 1974. *Comparing Foreign Policy: Theories, Findings, and Methods*. New York: Sage Publication.
- RR Zahroh Hayati Azizah, dkk., “The National Interests of Indonesia and Japan in the Indo-Pacific Region and the Defense Cooperation of the Two Countries”, *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 10, No. 2., (2023) Hal.119-132.
- Scott Barrett, “A Theory of International Cooperation” *Journal of Theoretical Politics*, Volume 11, No. 4, (1999) 519-541.
- Trading Economics, “Indonesia Exports to Fiji”, Report Trading Economics, diakses pada 8 November 2024, di: <https://tradingeconomics.com/indonesia/exports/fiji>.
- Umar, Suryadi Bakry. 2016. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, cetakan ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). Hal: 18-20.
- United Nations Development Programme. (2023). *Climate Resilience in the Pacific: Indonesia’s Role in Regional Stability*.
- William, Newman. 2000. *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*. (Boston: Allyn And Bacon) Hal: 72.